BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi telah berdampak positif terhadap kehidupan masa kini, salah satunya dapat dirasakan oleh masyarakat adalah kemajuan di bidang transportasi. Kendaraan bermotor menjadi favorit dalam memenuhi kebutuhan sebagai penunjang kelengkapan perekonomian masyarakat, karena dapat mempermudah akses dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selain manfaat dan kegunaannya dapat juga dijadikan sebagai simbol status sosial bagi pemiliknya.

Transportasi berkembang dengan pesat dengan adanya kemudahan dalam memperolehnya, terutama kendaraan bermotor roda dua yang jumlahnya melebihi pertambahan jumlah dan kualitas jalan. Akibatnya, menimbulkan berbagai macam permasalahan, salah satunya kemacetan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan adanya pertambahan kepemilikan kendaraan bermotor, maka penerimaan pajakkendaraan bermotor mengalami peningkatan tetapi juga berdampak negatif karena harus mengeluarkan biaya lebih tinggi akibat kemacetan yang terjadi.

Dengan berlakunya sistem otonomi daerah di Indonesia, Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap

daerah baik provinsi, kota, maupun kabupaten/kota dapat dengan mandiri melaksanakan dan menyediakan dana untuk membiayai aktifitas ekonominya masing-masing dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai sumber. Pembiayaan yang paling penting berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga tiap daerah berhak untuk melakukan pemungutan biaya berupa pajak. Pemberian wewenang kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak Januari 2010 (Waluyo. 2011: 23) “Perpajakan Indonesia”.

Berdasarkan UU Ketentuan Umum Pajak Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku “Pengantar Hukum Pajak” (H. Bohari. 2012: 21) , Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan

menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan jugapenyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu seperti halnya dengan retribusi.

Berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah berupaya untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor dengan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan secara progresif, terutama kendaraan bermotor roda dua, dengan jumlah pengendara roda dua secara massalpenggunaan jalan raya yang merupakan barang publik mempunyai beban biaya bertambah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pemerintah dapat mengendalikan jumlah kendaraan bermotor roda dua tanpa mengurangi fungsi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang tergolong kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam pajak dan retribusi daerah, provinsi dan kabupaten/kota dibagi dalam hal kewenangannya menetapkan pajak. Hal-hal yang termasuk kedalam bagian provinsi adalah pengaturan mengenai pajak kendaraan bermotor. Dalam pasal 6 UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kendaraan bermotor roda dua dikenakan sistem pajak progresif jika seseorang memiliki kendaraan dengan identitas yang sama dan kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu. Besaran pajak yang digunakan dalam undang-undang tersebut paling rendah 1% dan paling tinggi 2% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama. Untuk kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah 2 % dan paling tinggi 10%. Dalam undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang

ditentukan adalah range besarnya. Sedangkan tarifnya ditentukan oleh provinsi dengan sebuah Peraturan Daerah.

Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Dalam sistem perpajakan di Indonesia salah satu pajak yang diterapkan dengan sistem tarif progresif yaitu Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak memiliki peran penting, salah satunya merupakan instrumen dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang (masyarakat) yang memiliki penghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah, oleh karena itu tarif Pajak Penghasilan pribadi di Indonesia mengenal tarif pajak progresif di mana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif Pajak Penghasilannya.

Hal ini perlu dicermati, sebagaimana beban masyarakat sebagai Wajib Pajak mengalami peningkatan dikarenakan adanya biaya lebih tinggi yang harus dibayarkan dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, karena pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu potensi sumber penerimaan pajak daerah yang diperlukan oleh pemerintah dalam melakukan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor roda dua dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA” (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat)**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas timbul beberapa pertanyaan yang merupakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan tarif pajak progresif terhadap pajak kendaraan bermotor roda dua?
2. Bagaimana pengaruh diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor roda dua terhadap penerimaan pajak daerah baik secara parsial dan simultan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan tarif pajak progresif terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua
2. Untuk mengetahui tarif Pajak Progresif berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan roda dua.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menempuh ujian sarjana di Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha.
2. Bagi kalangan akademis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian yang serupa atau lebih mendalam atau menemukan teori baru, khususnya dalam hal yang berkenaan dengan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

-
3. Bagi kalangan praktisi penelitian ini diharapkan dapat membantu kinerja Dinas dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yang salah satunya bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya roda dua.
 4. Bagi kalangan umum penelitian berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai bidang perpajakan, khususnya berkenaan dengan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua.